



PENETAPAN

Nomor 1035/Pdt.G/2020/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, tempat tanggal lahir 03 April 1987, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Supir, alamat di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muhdiannur Khairat, S.H. Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Muhdiannur KH, S.H & Rekan alamat di Jalan H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 583/KH/PA.Sim/2020 pada tanggal 02 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat tanggal lahir Parapat 14 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Simalungun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Muhammad Irvan Kurniawan, S.H.** Advokat/Pengacara pada kantor M. Irvan K, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1035/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Blk. PA Simalungun), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 622/KH/PA.Sim/2020 pada tanggal 17 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tertanggal 02 November 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 1035/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 02 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2010, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tertanggal 03 Februari 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang Termohon di Parapat selama 2 tahun, Pemohon dengan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah makan tempat Pemohon bekerja selama 1 tahun, sampai Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1035/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri dan telah dikarunia tiga orang anak bernama:
 1. Anak ke I, perempuan, umur, 10 tahun.
 2. Anak ke II, laki-laki, umur 7 tahun.
 3. Anak ke III, laki-laki, umur 4 tahun.Ketiga anak Pemohon dengan Termohon tersebut tinggal bersama Termohon.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2015 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang penyebabnya:
 - a. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain.
 - b. Termohon sering berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon.
 - c. Termohon sering merasa kurang dengan penghasilan Pemohon.
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon masih terus-menerus berlanjut dikarenakan seperti yang telah disebutkan pada posita 4 huruf a,b dan c di atas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2020, disebabkan Termohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal seperti pada alamat Pemohon diatas, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1035/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1035/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga hadir di persidangan dengan diwakili oleh Kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya menyatakan kesediaannya bercerai dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 1035/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 18 November 2020, terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Mediator, dan mediasi yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, dinyatakan berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. tertanggal 10 Desember 2020;

Bahwa setelah perkara diperiksa sampai pada tahapan pembuktian dari Pemohon, pada persidangan tanggal 03 Maret 2021 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya menyatakan secara lisan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan mencoba menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan cara kekeluargaan di luar persidangan, oleh karena itu Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara lisan di persidangan bermohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan pencabutan perkara permohonan cerai talak yang diajukan dalam surat permohonan tertanggal 02 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1035/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Simalungun dengan nomor register 1035/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 02 November 2020;

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya memberikan tanggapan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setuju untuk dilakukan penyelesaian masalah rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan cara kekeluargaan di luar persidangan, sehingga Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak merasa keberatan apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencabut perkara ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian penetapan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2020 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1035/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ----- tanggal 19 Januari 1959 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rerkonvensi untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rerkonvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon Konvensi/Tergugat Rerkonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukum masing-masing agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rerkonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berdamai;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rerkonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalan mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1035/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Mediator Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, dan dalam laporan tertulis tertanggal 10 Desember 2020 Mediator menjelaskan bahwa perundingan melalui jalan mediasi tersebut berhasil sebagian mencapai kesepakatan;

Menimbang, Bahwa setelah perkara diperiksa sampai pada tahapan pembuktian dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada persidangan tanggal 03 Maret 2021 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya menyatakan secara lisan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan mencoba menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan cara kekeluargaan di luar persidangan, oleh karena itu Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara lisan di persidangan bermohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan pencabutan perkara permohonan cerai talak yang diajukan dalam surat permohonan tertanggal 02 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan nomor register 1035/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 02 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechts vordering*/Reglement Acara Perdata) alinea pertama yang menentukan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan syarat asal hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak Pemohon, sedangkan Majelis Hakim telah memeriksa pokok perkara, maka pencabutan perkara harus dilakukan atas kesepakatan dan persetujuan dari Termohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah sampai pada tahapan pembuktian, maka atas permohonan pencabutan perkara tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan tanggapan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setuju untuk dilakukan penyelesaian masalah rumah tangga

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1035/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan cara kekeluargaan di luar persidangan, sehingga Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak merasa keberatan apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencabut perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Simalungun, dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1035/Pdt.G/2020/PA.Sim. dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1035/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang, dibantu oleh Ansor, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ilmas, S.H.I.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera,

Ansor, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp350.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | Rp 20.000,00 |

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1035/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp470.000,00 |
| (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) | |

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1035/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)